



PIDANA MATI BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

TESIS

HISYAM FAHMI

1910622014

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Hisyam Fahmi

NIM : 1910622014

Tanggal : 23 Juli 2021

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 23 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Hisyam Fahmi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hisyam Fahmi

NIM : 1910622014

Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Juli 2021

Yang Menyatakan



Hisyam Fahmi

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Hisyam Fahmi
NRP : 1910622038
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.
Ketua Penguji



Dr. Supardi, S.H., M.H.
Penguji II/ Pembimbing

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 27 Juli 2021

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi sudah sangat meluas, korupsi semakin sistematis sehingga menimbulkan kerugian terhadap perekonomian nasional. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati bisa dijatuhkan dalam kondisi tertentu tetapi hingga saat ini belum ada koruptor yang divonis dengan hukuman mati. Permasalahan dalam penelitian ini: *pertama*, bagaimana implementasi pidana mati bagi tindak pidana korupsi di Indonesia, dan *kedua* bagaimana urgensi pidana mati diterapkan bagi para pelaku korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, dengan mengumpulkan data secara studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian yaitu *pertama*, sampai saat ini, belum ada implementasi hukuman mati untuk menghukum pelaku korupsi di Indonesia, karena indikator rumusannya masih multi tafsir dan terbatas pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUTPK. *Kedua*, tindak pidana korupsi tergolong dalam *serious crime*, sehingga hukuman mati masih diperlukan serta relevan diterapkan di Indonesia sebagai upaya pencegahan (*deterrent effect*).

Keywords: Pidana, Pidana Mati, Korupsi

ABSTRACT

Corruption has been widespread, it is increasingly systematic, causing losses to the national economy. In the article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption states that the death penalty can be imposed under certain conditions, however until today there is no corruptor has been sentenced to the death penalty. This study discussed issues related with corruption, including: first, how is the urgency of death penalty applied to corruptors in Indonesia, and secondly how is the implementation of death penalty for corruptors in Indonesia. The method applied in this study was a normative legal research type, with statutory approach and a conceptual approach. This study used primary legal materials, and data was collected by literature study, then analyzed using qualitative methods. The following conclusions can be drawn from this study: first, until now there has been no implementation of the death penalty to punish perpetrators of corruption in Indonesia, because the indicators of the formulation are still multi-interpreted and limited to the provisions of Article 2 paragraphs (1) UUTPK. Second, corruption is classified as a serious crime, so the death penalty is still needed and relevant to be applied in Indonesia as a deterrent effect.

Keywords: Penalty, Death Penalty, Corruption

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta semua pengikutnya.

Tugas Akhir yang berjudul “**Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**” ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil kepada penulis sejak awal perkuliahan sampai penulisan tugas akhir pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, AK., CPMA., CA. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Dr. Supardi, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing di tengah kesibukan sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta namun masih dengan sabar tetap memberikan kritik, saran serta masukan yang konstruktif dalam penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Penguji I yang telah memberikan kritik, saran-saran perbaikan yang konstruktif dalam tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Civitas Akademika, Ibu Juli Orion, SH, MH., dan Bapak Satino, SH serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang banyak mendukung kelancaran perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini;

7. Almarhum Ayahanda Mama dan Ibunda Mimi yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan program perkuliahan. Demikian halnya kepada Ayahanda dan Almarhumah Ibunda Mertua.
8. Istri tercinta Annisa Fatimah, buah hati Nawaf dan Akhtar serta Adik Hana yang telah memberikan support kepada penulis.
9. Kepada teman-teman konsentrasi Hukum Pidana, khususnya kepada Abdul Mukti, SH. Narwanto, SH. Aryaguna, SH., serta Lusiana Lamture SH, yang banyak memberikan masukan dan mewarnai dalam kebersamaan saat menempuh kuliah serta penulisan tesis.
10. Rekan-rekan Bimas Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan Kecamatan Jagakarsa serta Yayasan Dian Didaktika yang banyak mendukung dan memberikan toleransi kepada saya selama menempuh perkuliahan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna karena kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis menghargai kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ini.

Jakarta, 23 Juli 2021



Hisyam Fahmi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	8
1.5.1. Kerangka Teoritis	8
1.5.1.1 Penegakan Hukum.....	8
1.5.1.2. Teori Pidana.....	9
1.5.1.3. Tujuan Hukum.....	15
1.5.2. Kerangka Konseptual	17
1.6. Metode Penelitian.....	20
1.7. Sistematika Penulisan.....	23
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	25
2.1. Hukuman Mati	25
2.1.1. Konsep dan Sejarah Hukuman Mati.....	25
2.1.2. Pro dan Kontra Hukuman Mati	28
2.1.3. Kejahatan yang Diancam Hukuman Mati.....	31
2.2. Korupsi	34
2.2.1. Pengertian dan Kategori Korupsi	34
2.2.2. Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa.....	37
BAB 3 METODOLOGI.....	40
3.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2. Jenis Pendekatan	41
3.3. Sumber Bahan Hukum	42
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	43
BAB 4 HASIL PENELITIAN.....	44
4.1. Hukuman Mati sebagai Konsekuensi Kejahatan Korupsi	44
4.2. Implementasi Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi di Indonesia	45
4.3. Urgensi Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.....	51

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
RIWAYAT HIDUP	